

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2024



**KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

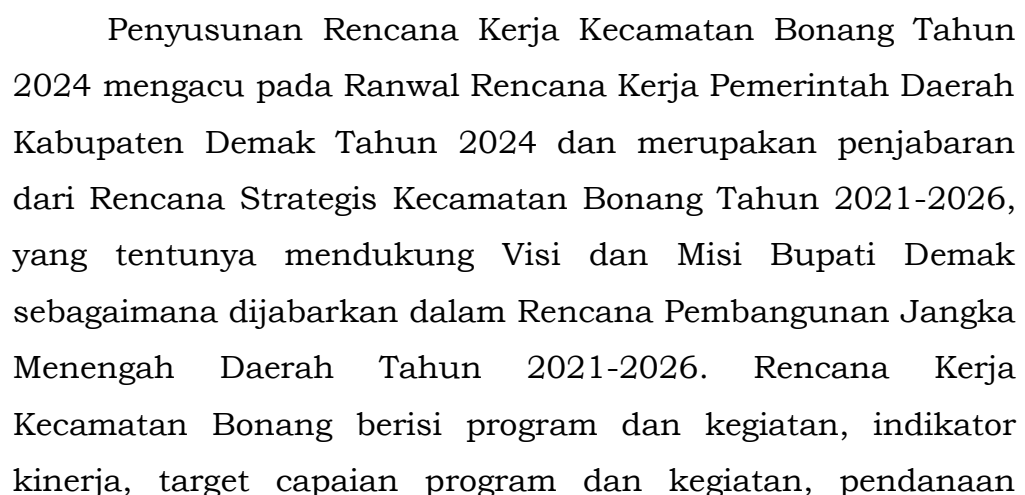
Renja Kecamatan Bonang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Kemudian Kecamatan Bonang menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bonang Tahun 2024 yang dapat berpedoman pada Dokumen RPJMD Kab. Demak Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Bonang Tahun 2021- 2026.

Pedoman Dijabarkan Pedoman



indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Renstra Kecamatan RKA Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Bonang Tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bonang Tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bonang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

34. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Bonang Tahun 2024 ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Bonang dalam penyusunan RKA Kecamatan Bonang Tahun 2024 sekaligus memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonang Tahun 2024 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan
3. Kecamatan Bonang Tahun 2024 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategi Kecamatan Bonang
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonang
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bonang
2.4	Review Awal terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	: PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BONANG TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bonang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bonang

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2022 Kecamatan Bonang melaksanakan 6 program dan 11 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Total pagu anggaran tahun 2022 di Kecamatan Bonang adalah Rp. 2.137.572.410,- dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.999.755.990,- (capaian anggaran sebesar 93,55 %)

Pada tahun 2022 dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang baik dan terealisasi sebesar 100 %. Sedangkan untuk Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2023 dapat diproyeksikan akan juga terealisasi 100%.

Prakiraan tingkat capaian kinerja program/kegiatan baik rutin maupun penunjang menunjukkan akan kinerja yang baik dan tercapai 100%. Seluruh kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Demak. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023 adalah rata-rata 100%.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan dokumen perencanaan akhir Perangkat Daerah/ PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bonang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bonang ini telah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bonang selama tahun 2021, 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, maka dalam pelaksanaan Rancangan Akhir Renja dari Perangkat Daerah Kecamatan Bonang Tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 (tahun lalu) di Kecamatan Bonang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Bahwa pada Perangkat Daerah Kecamatan Bonang dalam pelaksanaan Renja 2022 adalah tidak ada untuk Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluarannya tidak memenuhi target yang telah ditentukan di dalam Renja tersebut.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Bahwa Pada Perangkat Daerah Kecamatan Bonang ini dalam pelaksanaan Renja di tahun 2022 untuk Program/Kegiatan semuanya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan .

Bahwa Realisasi program/kegiatan pada tahun 2022 yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2022 ini pada Perangkat Daerah

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tidak ditemukan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran yang dialokasikan untuk kecamatan terkadang masih kurang untuk dapat memenuhi semua perencanaan kegiatan dan mencapai semua indikator yang ada di Rencana strategis
- b. Koordinasi yang belum optimal antara perangkat daerah terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan untuk desa/kecamatan, jadi terkadang hal ini juga menghambat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan
- c. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik tingkat pada kecamatan/desa
- d. Masih kurangnya tingkat kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang ada tingkat Perangkat Daerah/kecamatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra pada Perangkat Daerah Kecamatan Bonang

Bahwa Implikasi ini merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bonang adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra akan berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Bonang pada umumnya
- b. Terhadap program yang realisasinya belum dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan Renstra akan berdampak pada penyampaian dari laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Bonang ini.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara para Kasi

yang melaksanakan kegiatan dengan Kasubbag program dan keuangan yang menangani kegiatan dan yang dalam merencanakan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja

- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bonang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bonang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra 2021–2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021–2026		
								Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	147	24	2	2	100%	26	16%	
					– Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / bulan	90	12	18	15	83%	15	17%
					– Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	57	12	11	11	100%	23	40%
					Perencanaa Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah (Dokumen)	7		0	0	0	0	0%
					– Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	2			0	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
								Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
					- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKDP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		0	0	0	0%
					- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0	0	0	0%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20	18	-	0	0	0%
					- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (pegawai)	20	22	22	22	100%	110%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
					- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	42		42	42	100%	42	100%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%
					- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	40	8	8	8	100%	8	20%
					- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	245	48	49	49	100%	49	20%
					- Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1	1	100%	1	100%
					- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik tamu dan rapat koordinasi	1	1	0	0	100%	0	0%
					- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	317	20000	4	4	100%	4	1%
					-Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Paket)	60	12	12	12	100%	12	20%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
					- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	12	12	12	100%	12	20%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan (unit)	250	8	4	4	100%	4	2%
					- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	4	1		0%	0	0	0%
					-Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	235		3	3	100%	3	1%
					- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	8	7	1	1	100%	1	13%
					- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	1		0	0	0	0%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (Laporan)	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%
					- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60	12	12	12	100%	12	20%
					- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15	3	3	3	100%	3	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
							Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara (unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				- <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	44	6	6	100%	6	14%
				- <i>Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	122		0	0	0	0%
				- <i>Pemeliharaan Mebel</i>	Jumlah mebel yang Dipelihara/Direhabilitas (unit)i	235		0	0	0	0%
				- <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	1	2	100%	2	50%
				- <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedng Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara (Unit)	11		0	0	0	0%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
							Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (dokumen)	25	1	1	100%	1	4%
				- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	25	0	0	0	0	0%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen laporan Pelimpahan urusan pemerintah pelayanan perizinan yang dilaksanakan camat (laporan)	2	1	1	100%	1	50%
				- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	270		0	0	0	0%
				- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	1	1	1	100%	1	100%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra 2021–2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021–2026	
								Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan dokumen laporan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa (Dokumen)	2	2	2	2	100%	2	100%
				– Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	1	1	1	100%	1	20%
				– Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	6		1	1	100%	1	17%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (Laporan)	2	21	21	21	100%	21	1050%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
					- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	21	21	21	21	100%	21	100%
					- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	10	63	2	2	100%	2	20%
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan (Laporan)	1					0%	0%
					- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	252					0%	0%
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
							Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum (laporan)</i>	2	2	2	100%	2	100%
				- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)</i>	280	0			0%	0%
				- Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)</i>	105	21	21	100%	2100%	20%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset pemerintah daerah (pesen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra 2021–2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021–2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis yang dilaksanakan (Dokumen)	6	6	2	2	100%	100%	33%
					– Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	84			0	0	0%	0%
					– Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	168			0	0	0%	0%
					– Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	10	21	2	2	100%	2	20%
					– Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	21	0		0	0	0%	0%
					– Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	42	0		0	0	0%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
										Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1				2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
					- <i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)</i>		105	105	21	21	100%	21	20%

Tabel 2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		Kode Subkegiatan
					Target	Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10=(8/6)*100$	$11=(9/7)*100$	12
I	PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITASI KEHIDUPAN BERAGAMA										
a	Fasilitasi Ulama Umaro	Jumlah FKUU Yang dilaksanakan	Kegiatan								
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama Umaro	Jumlah FKUU Yang dilaksanakan	Kegiatan		2	75.000.000	2	74.000.000	100%	98,66%	
II	PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT										
a	Pelatihan ketrampilan, bantuanstimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan ketrampilan, bantuan stimulant dan pendampingan jaringan pemasaran	UMKM								
	Pelatihan ketrampilan UMKM dan Pendampingan Perizinan Usaha mikro	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan ketrampilan, bantuan stimulant dan pendampingan jaringan pemasaran	UMKM		40	25.000.000	60	24.550.000	100%	98,20%	

Berdasarkan Tabel di atas, terkait evaluasi program prioritas tahun 2022 dapat disimpulkan untuk penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama Umaro' sebanyak 2 kegiatan telah dilaksanakan pada bulan ramadhan dan muharram dengan capaian kinerja 100 %, sementara serapan anggaran yaitu sebesar Rp. 74.000.000,- (98,66 % dari pagu anggaran yang dilaksanakan). Sedangkan untuk kegiatan pelatihan UMKM dan pendampingan perizinan usaha mikro telah dilaksanakan berupa kegiatan pelatihan pengurusan izin usaha melalui OSS dan praktek pembuatan makanan ringan bekerjasama dengan Dimpmtsp dan PT. Sriboga Semarang. Capaian kinerja kegiatan tersebut adalah 100 %, sementara serapan anggaran yaitu sebesar Rp. 24.550.000,- (98,20 % dari pagu anggaran yang dilaksanakan)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Bonang, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Bonang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Demak;

4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Sosial Kemasyarakatan.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Bonang dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Bonang disajikan pada tabel berikut dengan format Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak

NO	Indikator	IKU	SPM /stan dar nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)
1	Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	V	–	–	75.68	76	77	78	74,69	73,55	77	78	
2	Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan yang mencapai target	V	–	–	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Indek Kepuasan Masyarakat	V			89	89	90	93,05	90,26	93,05	93,05	93,05	
4	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan secara umum belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kecamatan Bonang dihadapkan pada beberapa masalah berikut :

- 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal
- 2. Potensi pemberdayaan masyarakat belum terkelola secara optimal
- 3. Pembangunan infrastruktur lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat belum merata
- 4. Potensi bencana alam dan non alam yang dihadapi masyarakat
- 5. Tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan masyarakat yang belum merata

Kecamatan Bonang mencatatkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang lebih terinci sebagaimana berikut :

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Banjir dan Rob	Meluapnya air sungai yang tidak dapat menampung curah hujan yang tinggi, tidak adanya normalisasi sungai secara berkala, minimnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. Naiknya permukaan air laut dan turunnya permukaan tanah di kawasan pesisir
2	Gagal panen hasil pertanian	Masuknya air asin ke wilayah pertanian produktif dan musim yang tidak menentu
3	Pengelolaan Sampah	Kurangnya kesadaran dan kreativitas masyarakat dalam pengelolaan sampah.
4	Infrastruktur Jalan	Sumber anggaran yang belum merata serta tantangan kondisi geografis yang berbeda-beda
5	Rumah Tidak Layak Huni dan Jambanisasi	Tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat yang belum merata
6	Stunting	Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya gizi anak dan tingkat kemiskinan yang masih Tinggi

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
7	Kemiskinan Ekstrem	Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga masih banyaknya permasalahan sosial yang timbul di masyarakat
8	Anak Tidak Sekolah	Orientasi pendidikan dan tingkat pendapatan yang berbeda-beda di masyarakat
10	Belum semua usaha kecil/mikro memiliki izin usaha	Kurangnya pemahaman pemilik usaha akan pentingnya izin usaha dan tata cara pengajuan izin usaha
11	Terdapat produk-produk lokal yang belum terpasarkan dengan baik	Kurangnya sarana promosi dan kreativitas pengelola / pelaku usaha untuk produk-produk lokal dan BUMDes
12	BUMDes belum terkelola dengan optimal	Manajemen pengelolaan BUMDes yang masih lemah, kurangnya kreativitas pengelola serta kurangnya dukungan dana serta pelatihan pengelolaan BUMDes
13	Pemilihan Serentak (Presiden, DPR RI/D, Kepala Daerah)	Masih terdapatnya sikap apatis dari sebagian masyarakat dalam pemilihan serentak, disisi lain masih mudahnya masyarakat dipecah belah dengan isu yang belum jelas kebenarannya.
14	Dokumen Perencanaan Desa yang kurang berkualitas	Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa serta kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa dalam perencanaan di desa
15	Aparatur Pemerintahan Desa yang belum dapat melaksanakan tupoksinya secara optimal	Kualitas sumber daya manusia dan tingkat Pendidikan yang berbeda-beda, kurang terampilnya dalam memanfaatkan teknologi serta kurangnya pemahaman terkait regulasi yang mengatur desa
16	Masih ada lembaga desa yang belum berfungsi secara optimal	Lembaga desa belum sepenuhnya memahami tugas, fungsi dan kewajiban dan kurangnya tingkat pemberdayaan lembaga desa

Beberapa isu strategis terkait permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, oleh karena itu beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan antar lain :

1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para stakeholders terkait penanganan banjir dan rob

2. Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terkait pengelolaan sampah
3. Pembangunan infrastruktur sesuai urutan prioritas, penyuluhan, pendampingan, dan penganggaran di bidang Kesehatan dalam menangani stunting
4. Pendampingan, sosialisasi dan penganggaran terkait penanganan kemiskinan ekstrem, RTLH, jambanisasi, anak tidak/putus sekolah
5. Pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM dan pengelola BUMDes dalam mengembangkan usahanya
6. Membuka forum komunikasi antara unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam menanggulangi konflik sosial serta sosialisasi akan pentingnya arti demokrasi
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari unsur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa melalui Bimbingan Teknis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD akan dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan yang ada di OPD Kecamatan Bonang. Dalam membandingkan hasil rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan ini didapatkan beberapa perbedaan. Beberapa sub kegiatan yang direncanakan pada rancangan awal RKPD dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya yang lebih prioritas. Sebagian kegiatan dan sub kegiatan berubah besarannya, karena pagu anggaran yang ditetapkan berubah jika dibandingkan dengan pagu rancangan awal RKPD.

Beberapa perubahan yang ada di rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan berdasarkan pagu indikatif untuk Kecamatan Bonang yang sudah ditetapkan antara lain :

1. Sub kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyedia administrasi tugas ASN ada perubahan pagu anggaran
2. Adanya penambahan anggaran pada sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan (DBHCHT)
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah (sub kegiatan pengadaan kendaraan operasional lapangan, pengadaan mebel

dan peralatan mesin lainnya) serta sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung dihapuskan karena pengurangan pagu anggaran

4. Adanya penambahan anggaran pada program unggulan Bupati. Sub kegiatan yang anggaranya dinaikan adalah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
5. Adanya pengurangan anggaran pada sub kegiatan sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan termasuk untuk pemilihan serentak eksekutif dan legislatif

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan
Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bonang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN				3.041.851.806	KECAMATAN				2.810.667.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti		2.569.856.806	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	2.439.472.000
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan			9.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	6,000,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.000.000
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.109.556.806	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan	2 Dokumen	2.070.667.000
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.949.556.806	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	1.888.245.000
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume	160.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	182.422.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				96.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	140.075.000
1)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	16.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	16.500.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	22 Orang	73.575.000
3)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	5.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	50.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				95.300.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	94.558.000
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.500.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000
3)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22000 Paket	7.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	7.000.000
4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,800,000
5)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1527 Laporan	48.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	47.580.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	4.678.000
7)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	3.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	3.000.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah BMD yang diadakan		82.000.000					
1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	17.000.000					
2)	Pengadaan Mebel	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	74 Unit	15.000.000					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000					
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100 persen	52.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100 Persen	67.500.000
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	65.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100 persen	52.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100 Persen	60.672.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	1 Unit	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.115.000
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	31.237.000
3)	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	2.000.000
4)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	10.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000					
6)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.320.000
7)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000					
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100 %	40.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100 %	15.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan	1 Laporan	35.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	10.000.000
1)	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	35.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	8 Laporan	10.000.000
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	65 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 Laporan	5.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	65 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	5.000.000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	100 %	45.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	100 %	75.000.000
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa	2 Lembaga Kemsyruatan	45.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa	2 Lembaga Kemsyruatan	75.000.000
1)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga	25.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2)	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokume n	20.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	1 Dokume n	50.000.000
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan keamanan wilayah	100 %	276.195.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan keamanan wilayah	100 %	221.195.000
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	2 Laporan	266.195.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	2 Laporan	221.195.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggar aan ketertiban umum yang dilaksanakan	2 Laporan	236.195.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggar aan ketertiban umum yang dilaksanakan	21 Laporan	136.195.000
2)	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	30.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	75.000.000
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan	1 Laporan	10.000.000
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Demak, Bonang,	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	1	10.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kepolisian Negara Republik Indonesia				Semua Kelurahan	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	60.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	15.000.000
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Laporan	60.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Laporan	15.000.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang	70 Orang	55.800.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	70 Orang	10.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
2)	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan	5. 000. 000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan	5. 000. 000
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintaha n Desa	100 %	50. 000. 000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintaha n	100 %	45. 000. 000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Desa		
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 Dokumen	45.000.000
1)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 Dokumen	5,000,000
2)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	42 Dokumen	5,000,000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	1 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa	21 Dokumen	5,000,000
4)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	35.000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Demak, Bonang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	21 Dokumen	30,000,000
					3.041.851.806					2.810.667.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Bonang diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan (Musrenbangdes/kel) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2023. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat.

Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Demak.

Masukan atau bahan musrenbang berasal dari:

- a. Masukan yang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan selaras dengan skala prioritas daerah.
- b. Masukan dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang desa/kelurahan. Yang isinya usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kabupaten Demak.
- c. Masukan/bahan Musrenbang dari Kecamatan adalah Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan.

Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD memuat : Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah dimutakhirkan sesuai berita acara Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Keluaran yang dihasilkan proses Musrenbang Kecamatan adalah :

- a. Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbangcam dan ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang tersebut dengan dilampiri :
 - ✓ Daftar Hadir peserta Musrenbangcam
 - ✓ Daftar usulan prioritas program, kegiatan dan anggaran kecamatan untuk bahan penyusunan rancangan renja Pemerintah Daerah
 - ✓ Daftar program dan kegiatan yang belum disepakati dalam Musrenbangcam.
- b. Penetapan delegasi peserta yang dipilih untuk mewakili kecamatan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten sebanyak 5 orang, terdiri dari delegasi kecamatan 1 orang dan delegasi dari desa 3 orang dan 1 keterwakilan perempuan.

Usulan program/kegiatan dari masyarakat yang terserap dalam Musrenbangcam di Kecamatan Bonang Tahun 2023 tersaji di tabel berikut 2.5 ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bonang

No	Pekerjaan/Usulan	Indikator Kinerja	Lokasi (Desa/ Kel)	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan- kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Dalam RPJMN 2019 – 2024 ada 7 agenda pembangunan yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga masih menjadi prioritas Pemerintah. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 telah mengamanatkan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah intervensi

yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 terdapat tiga strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem. yaitu : pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan.

Tema pembangunan Pemerintah kabupaten Demak pada tahun 2024 adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal. Arah kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui upaya-upaya penciptaan sentra-sentra ekonomi rakyat dan promosi komoditas unggulan daerah. Penguatan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara regional dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Demak. Potensi lokal yang dimaksud adalah lapangan usaha yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian daerah dan sektor lain yang berpotensi menyumbang kenaikan PDRB secara signifikan, yaitu lapangan usaha pertanian, perikanan, industri (termasuk UMKM) dan perdagangan. Potensi lainnya yaitu sektor pariwisata yang menjadi penggerak lapangan usaha lainnya serta sektor teknologi informasi. Penguatan daya saing ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Demak sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kecamatan Bonang sebagai perangkat daerah Kabupaten Demak memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Bonang memiliki ruang lingkup tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban,

pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik dan sebagainya. Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Bonang di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bonang terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Tujuannya adalah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Bonang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Bonang. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Bonang untuk periode 2021-2026. Sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

TABEL 3.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR BESERTA TARGET RENSTRA OPD

N O	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
					2023	2024	
	Tujuan 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.68	77	78	
	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah	Tingkat capaian indikator sasaran perangkat daerah	%	100	100	100	
	Tujuan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bonang	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	89	93,05	93,05	
	Sasaran 1.Meningkatnya kualitas layanan kecamatan	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Demak, maka pada Tahun 2024 Kecamatan Bonang melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik**
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
 - a. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa.
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.**
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantibum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2023dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bonang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BONANG						2. 810. 667. 000, 00							2. 878. 375. 459, 00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						922. 422. 000, 00							811. 279. 759, 00	
	7. 01	KECAMATAN						922. 422. 000, 00							811. 279. 759, 00	
1.	7. 01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan</i>	–			100 %	2. 439. 472. 000, 00						–	555. 100. 000, 00	
	7. 01. 01. 2. 01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah</i>	–			9 Dokumen	6. 000. 000, 00			–	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	–	–	15. 000. 000, 00	KECAMATAN BONANG
	7. 01. 01. 2. 01. 000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	2. 000. 000, 00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	–	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	–		5. 000. 000, 00	KECAMATAN BONANG
	7. 01. 01. 2. 01. 000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	1. 000. 000, 00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	–	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	–		2. 500. 000, 00	KECAMATAN BONANG
	7. 01. 01. 2. 01. 000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	1. 000. 000, 00	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	–	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	–		2. 500. 000, 00	KECAMATAN BONANG
	7. 01. 01. 2. 01. 000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		5.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	-			2 Dokumen	2.070.667.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	170.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.888.245.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		2.067.095.700,00	KECAMATAN BONANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										UMUM						
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	182.422.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		170.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi KepegawaianPerangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 Persen	140.075.000,00			-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	98.800.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	16.500.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		18.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	73.575.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		75.800.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	50.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		5.000.000,00	KECAMATAN BONANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 Persen	94.558.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	119.300.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.500.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		6.500.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		23.800.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		7.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan				24 Paket	7.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yangDisediakan				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		2.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD				12 Laporan	47.580.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		60.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan ArsipDinamis pada SKPD				2 Dokumen	4.678.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		7.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		3.000.000,00	KECAMATAN BONANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yangtersedia	-			100 Persen	67.500.000,00			-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	52.500.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		500.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	65.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		50.000.000,00	KECAMATAN BONANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan	-			42 unit	60.672.000,00			-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	99.500.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	10.115.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	31.237.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yangDipelihara				4 Unit	2.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	500.000,00		KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara				24 Unit	10.000.000,00	-	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	7.320.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		10.000.000,00	KECAMATAN BONANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	-			100 %	15.000.000,00						-	11.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			1 Laporan	10.000.000,00			-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	5.500.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8 Laporan	10.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		5.500.000,00	KECAMATAN BONANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-			1 laporan	5.000.000,00			-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	5.500.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		5.500.000,00	KECAMATAN BONANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	-			100 %	75.000.000,00						-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatanpemberdayaan desa	-			2 Dokumen	75.000.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	55.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				21 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		25.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		30.000.000,00	KECAMATAN BONANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah	-			100 %	221.195.000,00						-	118.329.759,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum yang dilaksanakan	-			2 Laporan	211.195.000,00			-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	113.329.759,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	136.195.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	329.759,00		KECAMATAN BONANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	000.000,00		KECAMATAN BONANG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakanperda dan perkara yang dilaksanakan	-			1 Laporan	10.000.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		5.000.000,00	KECAMATAN BONANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	-			100 %	15.000.000,00						-	45.250.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 Laporan	15.000.000,00			-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	45.250.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan				70 Orang	10.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		40.000.000,00	KECAMATAN BONANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia													
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yangDitangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		5.250.000,00	KECAMATAN BONANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	-			100 %	45.000.000,00						-	26.600.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa	-			16 Dokumen	45.000.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis	-	-	26.600.000,00	KECAMATAN BONANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												smart city				
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		2.200.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		2.200.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		2.200.000,00	KECAMATAN BONANG
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Demak, Bonang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		20.000.000,00	KECAMATAN BONANG
	JUMLAH							2.810.667.000,00							2.878.375.459,00	

4.2. Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026, Program unggulan yang dilaksanakan di Kecamatan Bonang yaitu fasilitasi forum komunikasi ulama-umaro' dan pelatihan ketrampilan UMKM serta pendampingan perizinan usaha mikro. Fasilitasi forum komunikasi ulama-umaro' dilakukan sebagai media silaturahmi, komunikasi, dan konsultasi pemerintah daerah kepada para masyayikh/kyai/ulama/sesepuh-pinisepuh sebagai representasi tokoh masyarakat untuk membahas permasalahan yang ada di wilayah. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, diperlukan juga pelatihan ketrampilan UMKM serta pendampingan perizinan usaha mikro.

Target yang adakan dicapai oleh Kecamatan Bonang terkait program unggulan Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. FKUU dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan yang direncanakan bulan syawal saat idul fitri dan tahun baru islam 1 (satu) muharram
2. Pelatihan UMKM dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dengan target 40 pelaku UMKM.

Kolaborasi yang dilakukan dalam rencana implementasi program unggulan fasilitasi forum komunikasi ulama'-umaro' yaitu dengan melibatkan Pemerintah Desa, Instansi lintas sektor di lingkungan Kecamatan Bonang serta perwakilan tokoh ulama yang ada diwilayah Kecamatan Bonang. Sedangkan kegiatan pelatihan ketrampilan UMKM serta pendampingan perizinan usaha mikro di tahun 2024, Kecamatan Bonang merencanakan pelatihan pemasaran online bekerjasama dengan market place seperti shopee / tokopedia dan juga pelatihan memasukan produk dalam E-Katalog bekerjasama dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Hal ini dimaksudkan dalam memperluas pemasaran produk pelaku UMKM dikarenakan pelatihan perizinan sudah dilaksanakan di Tahun 2022 berupa pengurusan NIB, PIRT dan di tahun 2023 berupa pelatihan sertifikasi halal serta desain grafis produk UMKM. Berikut ini tabel rencana program prioritas dan rencana implementasi tahun 2024 :

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2024

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2022		PROYEKSI 2023		TARGET 2024		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Target	Anggaran					
1	2	3	4	5	8	8	10	10	13	14	12		
I	PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITASI KEHIDUPAN BERAGAMA												
a	Fasilitasi Ulama Umaro	Jumlah FKUU Yang dilaksanakan	Kegiatan										
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama Umaro	Jumlah FKUU Yang dilaksanakan	Kegiatan		2	74.000.000	2	76.000.000	2	76.000.000	2	7.01.04.2.01.02	
II	PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT												
a	Pelatihan ketrampilan, bantuanstimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan ketrampilan, bantuan stimulant dan pendampingan jaringan pemasaran	UMKM										
	Pelatihan ketrampilan UMKM dan Pendampingan Perizinan Usaha mikro	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan ketrampilan, bantuan stimulant dan pendampingan jaringan pemasaran	UMKM		60	24.550.000	40	25.000.000	40	25.000.000	45	7.01.03.2.01.02	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bonang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonang Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Bonang. Rencana kerja (Renja) ini nantinya sebagai rencana awal bagi OPD Kecamatan Bonang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan oleh perangkat daerah terkait hal-hal sebagai berikut:

5.1 Catatan penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencapai capaian kinerja program yaitu jumlah pegawai struktural yang belum terisi karena mutasi dan pensiun sehingga penyelesaian pekerjaan belum optimal, besaran pagu gaji PNS yang masih kurang jika diasumsikan ada pengisian pejabat struktural yang kosong / PNS baru pada tahun 2024, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga ada beberapa kegiatan / sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2024 seperti kegiatan pengadaan barang milik daerah dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tidak bisa dilaksanakan. Berkurangnya anggaran pemilihan serentak baik Presiden, DPR RI / D, dan Kepala Daerah yang mengakibatkan perlunya penyesuaian ulang dengan besaran pagu anggaran yang tersedia.

5.2 Kaidah- Kaidah Pelaksanaan

Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD Kecamatan Bonang dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun 2024 merupakan rencana pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Bonang. Penyusunan Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berpedoman pada:

1. Dokumen RPJMD Kab. Demak Tahun 2021-2026 dan Renstra 2021-2026 Kecamatan Bonang yang menjadi Acuan penyusunan tujuan, Sasaran, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Lokasi kegiatan serta Perkiraan maju.
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program & Kegiatan Periode Sebelumnya guna perumusan kegiatan, alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Bonang.
3. Usulan Program serta Kegiatan Dari Masyarakat dalam perumusan kegiatan dalam rancangan Renja (Rencana Kerja) guna mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas

Berdasarkan pedoman diatas maka Renja Kecamatan Bonang Tahun 2024 disusun dalam rangka dijadikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bonang. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Kecamatan Bonang Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Kecamatan Bonang Tahun 2024 dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahun 2024 dan menjadi acuan bagi sekretariat, dan seksi-seksi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.
3. Selama pelaksanaan Renja dimaksud, harus dilakukan pengendalian, yaitu monitoring dan evaluasi sehingga dapat diketahui faktor keberhasilan maupun faktor penghambat apabila program dan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan.
4. Renja 2024 akan dilakukan perubahan dan penyesuaian prioritas kebutuhan dan anggaran sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Demak yang selanjutnya akan menjadi Dokumen Renja tahun 2024 yang telah ditetapkan (definitif).

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonang dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Kecamatan Bonang dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam satu tahun anggaran 2024 dengan mengacu kepada RKPD tahun 2024. Pelaksanaan dokumen Renja tahunan merupakan bagian dari pencapaian target kinerja yang dicantumkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagai arahan

pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini. Rencana Kerja Kecamatan Bonang ini diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan sasaran Renstra yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Guna mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Demak yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan Perencanaan yang bersih, akuntabel, aspiratif, partisipatif, dan transparan, maka Kecamatan Bonang diharapkan untuk dapat :

1. Meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas sumber daya yang ada di wilayah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerja;
2. Selalu berusaha meningkatkan tingkat pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan publik;
3. Bekerja keras serta berbenah diri, meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal;
4. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi;
5. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi;
6. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan;
7. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bonang Tahun 2024 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

Lampiran 1.

*PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026
DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH*

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JANGKUPAN	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN				7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN				7	01				KECAMATAN			
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				X	XX	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat DokumenDaerah	Dokumen	X	XX	01	1.0 1	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	201	02	Koordinasi dan	Tersedianya	Jumlah Dokumen	Dokumen	X	XX	01	1.0	0002	Koordinasi dan	Tersedianya Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURISDIKSI	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JINSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1		Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
X	XX	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	X	XX	01	1.0 1	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	X	XX	01	1.0 1	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan				X	XX	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURUD	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JINSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Perangkat Daerah												
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	X	XX	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan
X	XX	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	X	XX	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	X	XX	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	X	XX	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
X	XX	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang	X	XX	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	Orang

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURISDIKSI	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JURISDIKSI	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Undangan	Peraturan Perundang- Undangan									PerundangUndanga n	
X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah				X	XX	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	X	XX	01	1.0 6	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	X	XX	01	1.0 6	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	X	XX	01	1.0 6	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	X	XX	01	1.0 6	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	X	XX	01	1.0 6	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURISDIKSI	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JURISDIKSI	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					undangan	Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan									Undangan yang Disediakan	
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	X	XX	01	1.0 6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X	XX	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	X	XX	01	1.0 6	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	X	XX	01	1.0 6	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				X	XX	01	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
X	XX	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tersedianya Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Unit	X	XX	01	1.0 7	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURUD	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JINSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Lapangan	Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Disediakan									Lapangan yang Disediakan	
X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	X	XX	01	1.0 7	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket
X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	X	XX	01	1.0 7	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	X	XX	01	1.0 7	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	X	XX	01	1.0 7	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				X	XX	01	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURUD	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JINSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	X	XX	01	1.0 8	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	X	XX	01	1.0 8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				X	XX	01	1.0 9		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	X	XX	01	1.0 9	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	X	XX	01	1.0 9	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURKUD	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JINSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
X	XX	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	X	XX	01	1.0 9	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	X	XX	01	1.0 9	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	X	XX	01	1.0 9	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	X	XX	01	1.0 9	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Terlaksananya Pemeliharaan/Re	Jumlah Sarana dan	Unit	X	XX	01	1.0 9	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabili	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURISDIKSI	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JINSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	persen	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURUPD	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JINSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7	01	02	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Laporan	7	01	02	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
7	01	02	2.0 4	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	7	01	02	2.0 4	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan
7	01	02	2.0 4	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	7	01	02	2.0 4	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	Persen	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa	Lembaga Kemasyarak atan	7	01	03	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURUD	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JINSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7	01	03	2.0 1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	7	01	03	2.0 1	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakan
7	01	03	2.0 1	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	7	01	03	2.0 1	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan keamanan wilayah	persen	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	laporan	7	01	04	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURUSAN	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JURUSAN	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7	01	04	2.0 1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	01	04	2.0 1	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	04	2.0 1	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	7	01	04	2.0 1	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan
7	01	04	2.0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan	laporan	7	01	04	2.0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
7	01	04	2.0 2	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	Laporan	7	01	04	2.0 2	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Laporan

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURISDIKSI	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JURISDIKSI	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	persen	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	laporan	7	01	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.0 1	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Orang	7	01	05	2.0 1	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Orang

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURISDIKSI	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JURISDIKSI	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7	01	05	2.0 1	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	7	01	05	2.0 1	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, Keuangan dan aset	persen	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURISDIKSI	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JURISDIKSI	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
							pemerintahan Desa										
7	01	06	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	7	01	06	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.0 1	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	7	01	06	2.0 1	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen
7	01	06	2.0 1	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	01	06	2.0 1	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen
7	01	06	2.0 1	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	Dokumen	7	01	06	2.0 1	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	Dokumen

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / JURUD	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JINSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
							Pendayagunaan Aset Desa									Pendayagunaan Aset Desa	
7	01	06	2.0 1	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	7	01	06	2.0 1	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen
7	01	06	2.0 1	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	7	01	06	2.0 1	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen
7	01	06	2.0 1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	7	01	06	2.0 1	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen